



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD RIZQI LAZWARDI

11727101093

KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul ***"Pengawasan terhadap parkir liar di Sukaramai Trade Centre oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru."*** yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD RIZQI LAZWARDI
 NIM : 11727101093
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munagasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Dzulkaidah 1442 H
 15 Juni 2021 M

Pembimbing Skripsi

RONI KURNIAWAN,SH.,MH
 NIK. 130217086

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PENGAWASAN PARKIR LIAR DI SUKARAMAI TRADE CENTRE OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 284 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PESERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TUGAS PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU"* yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD RIZQI LAZWARDI**
 NIM : 11727101093
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 1 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juli 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag.

Sekretaris
Basir, S.H., M.H.

Penguji I
Musrifah, S.H., M.H.

Penguji II
Ilham Akbar, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Rizqi lazwardi (2021): Pengawasan parkir liar di Sukaramai Trade Centre oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis perparkiran pada dinas perhubungan kota pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 Tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis perparkiran pada dinas perhubungan kota pekanbaru dijelaskan pada pasal 5 ayat 2 huruf F di jelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perparkiran dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan berupa patroli dan melakukan razia-razia dititik-titik terdapat larangan parkir terutama di depan area Sukatramai Trade Centre.

Permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap parkir liar terutama di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan dalam pengumpulan data. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, sekunder serta tersier. lokasi penelitian berada di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (UPTD Perparkiran) dan Sukaramai Trade Center.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kota pekanbaru terhadap pengawasan parkir liar belum berjalan optimal, masih banyak Juru parkir liar yang tidak patuh terhadap pertauran yang ada. Faktor penghambat yang terdapat pada penelitian ini terbagi menjadi dua yakni, faktor internal meliputi, personil pengawasan upt perparkiran, sumber daya operasional, sedangkan faktor eksternal meliputi perilaku pengguna jasa parkir, lahan parkir dan juga lapangan pekerjaan tukang parkir terancam di gantikan mesin.

Kata Kunci : Pengawasan, Parkir Liar, Sukaramai Trade Centre.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'amin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PENGAWASAN PARKIR LIAR DI SUKARAMAI TRADE CENTRE OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 284 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU”.

Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril

maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Lazwardi Kasmir S.E, dan Ibunda Suhada Syam yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a restu & ridha nya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.Wahidin, M.Ag selaku wakil Dekan II, Bapak Dr. H.Maghfirah, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Firdaus, S.H, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim,S.Ag,S.H,M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Teman-teman seperjuangan penulis terutama Miftahul Muhtadin, Muhammad Nandi dan anggota Black Dragon dalam menuntut Ilmu di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.
9. Nadya Tafari, terimakasih telah hadir, sabar, membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah membalas semua kebaikanmu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dan menambah pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 1 Juli 2021

Penulis

MUHAMMAD RIZQI LAZWARDI
NIM. 11727101093



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penulisan	11
E. Manfaat Penulisan	12
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	19
B. Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	20
C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru....	22
D. Strategi dan Kebijakan	23
E. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	23
F. Produk Hukum	25
G. Uraian Tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru	26
H. Sejarah Sukaramai Trade Centre (Plaza Sukaramai)	29
I. Visi Misi Sukaramai Trade Centre	30
J. Fasilitas Sukaramai Trade Centre	31



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Parkir	34
B. Tinjauan Pengawasan	53
C. Tinjauan Penegakan Hukum	58
D. Tinjauan Peraturan Walikota Nomor 287 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Parkir Liar di Sukaramai Trade Centre Oleh Unit Pelaksana teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 287 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	64
B. Faktor-faktor Penghambat Pengawasan Parkir Liar oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru di Sukaramai Trade Centre	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel	16
Tabel 2.1	Perubahan nama Dinas Perhubunga.....	20
Tabel 2.2	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	22
Tabel 3.1	Penentuan satuan Ruang Parkir.....	43
Tabel 3.2	Penggunaan sebagian badan jalan sebagai tempat parkir.....	46
Tabel 3.3	Lebar minimum jalan kolektor satubarah untuk parkir pada Badan jalan	48
Tabel 4.1	Pengorganisasian parkir UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah sebagai lembaga suprastruktur, adalah badan atau lembaga eksekutif dalam negara. Pemerintah merupakan lembaga atau badan publik yang bertugas mewujudkan tujuan negara. Berdasarkan yang telah ditentukan oleh daerah otonom, yang mengatur daerah otonom adalah bupati atau walikota. Merekalah yang paling mempunyai kepetingan untuk mengimplementasikan kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.¹ Keputusan kepala daerah ditetapkan dalam dua hal yaitu: melaksanakan Perda dan melaksanakan urusan tugas-tugas pembantuan.²

Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi Pemerintah daerah³. Di dalam keadaan kaedah atau peraturan hukum terkadang tindakan yang harus dilaksanakan yang tidak lain berupa penegakan hukum itu, hukum itu di ciptakan untuk dilaksanakan, oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi dikatakan sebagai hukum apabila tidak pernah dilakukan.⁴ Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang

¹ Paimin Napitupulu, *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*, (Jakarta: P.T Alumni, Cet.Ke-2, 2012) hlm. 37-38

² Abu Samah dan Peri Pirmansyah, *Hukum Administrasi Indonesia*, (Pekanbaru: STAI H.M lukman Edy Press, 2015) hlm. 35

³ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Cet, Ke-7, (Yogyakarta: Kanisius, 2007) hlm 202

⁴ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hlm. 250



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dimiliki oleh masing-masing daerah. Tujuan utama dari perda adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan perda harus didirikan oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya, antara lain : kepetingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.⁵

Otonomi daerah pada dasarnya berkaitan erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya memberikan dampak baik yang cukup positif bagi daerah, maupun yang mungkin menyulitkan daerah bahkan pemerintah pusat sebagai konsekuensi maka diperlukan pengaturan yang sistematis yang menggambarkan adanya hubungan berjenjang baik yang berkaitan dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.⁶

Otonomi daerah ini memberikan hak kepada daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hak yang diberikan bukan hanya sekadar mengurus administrasi pemerintahan saja melainkan untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakat yang sesuai dengan nilai nilai yang hidup di daerah tersebut, termasuk dalam hal ini mengenai ketertiban lalu lintas jalan.

Lalu lintas sangat penting bagi seluruh masyarakat, aktivitas akan berjalan dengan baik setiap harinya apabila lalu lintas berjalan dengan lancar pula.

⁵ Tjahya Supriatna, *Sistem administrai pemerintahan di daerah* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996) hlm. 30

⁶ Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: menuju pemberdayaan masyarakat desa*, (Makasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurnal, Vol.1) hlm. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aktivitas di dalam kehidupan banyak dilakukan di luar rumah, maka dari itu jalan raya adalah objek yang sangat penting karena digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas bepergian. Ketika jalan raya yang digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitas digunakan tidak sesuai fungsinya tentu akan menimbulkan masalah yang sangat mengganggu kelancaran lalu lintas.

Jalan raya yang dibangun hanya cukup menampung lalu lalang kendaraan, dengan ukuran yang tidak terlalu lebar jalan raya masih saja dimanfaatkan beberapa orang untuk membuka lahan tempat berjualan. Jalan raya yang dimanfaatkan untuk membuka lahan parkir, trotoar yang digunakan untuk berjualan membuat jalan raya semakin sempit dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.⁷

Perparkiran menjadi fenomena yang sering kita jumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut bukanlah masalah baru yang baru kita dengar, masalah perparkiran ini terjadi bahkan di seluruh wilayah Indonesia terutama di daerah kota Pekanbaru terutama di Sukaramai Trade Centre Jl Sudirman. Parkir dapat berupa kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan

⁷ Muhammad Nanang Prayudyanto, *Manajemen Parkir di Perkotaan*, (Jakarta : GIZ, 2012) hlm. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraanya dapat parkir di tempat yang mudah dicapai, salah satunya di tepi jalan umum.

Parkir di tepi jalan adalah parkir yang berada pada badan jalan, maka, jenis parkir ini dapat mengakibatkan turunya kapasitas jalan karena mengambil bagian dari jalan sehingga badan jalan menjadi sempit. Seiring berjalannya waktu ruang parkir yang disediakan pemerintah sangat minim jumlahnya untuk menampung kendaraan bermotor yang kian tahun kian bertambah. Kemudian masyarakat menggunakan ruang yang kosong untuk parkir, maka jalan raya tidak dilewatkan untuk dijadikan tempat parkir. Dengan diadakannya jalan raya sebagai tempat parkir, maka akan timbul banyak masalah, mulai dari kelancaran lalu lintas yang akan terganggu hingga menimbulkan kesembrawutan kota.

Kota Pekanbaru merupakan kota dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di setiap tahunnya, bukan hanya itu pertumbuhan pembangunan di Kota Pekanbaru pun terus berkembang. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, alat transportasi baik umum maupun pribadi di kota Pekanbaru terus mengalami kenaikan, dengan naiknya jumlah alat transportasi yang ada di Pekanbaru ini, hal ini berdampak pada peningkatan jumlah kebutuhan akan tempat/lahan parkir yang akan digunakan oleh masyarakat untuk memarkirkan kendaraan yang mereka gunakan.

Banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan transportasi pribadi dan tidak diimbangi dengan persediaan lahan parkir sesuai kebutuhan para pengunjung oleh pemerintah kota Pekanbaru. Terutama tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat seperti Sukarami Trade Centre di Jl.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudirman, tidak hanya kendaraan roda dua maupun roda empat, banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan baik di trotoar yang di fungsikan untuk pejalan kaki, mereka pun berjualan di sekitaran bahu jalan yang menambah macetnya jalan raya.

Tidak hanya mengganggu kendaraan yang berada di jalan raya, transportasi umum seperti Trans metro Pekanbaru pun terganggu jalurnya akibat dari parkir liar yang berada di bahu jalan, sehingga apabila adanya kendaraan yang terparkir di lajur pemberhentian bus Trans metro Pekanbaru, dapat mengakibatkan macet laju lalu lintas. Adanya parkir liar di depan Sukaramai trade center ini menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pedagang kaki lima yang berada di bahu jalan pun tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, namun mengganggu keindahan bahu jalan dan trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki. Jalan raya hanya menampung lalu lintas kendaraan, dengan ukuran yang tidak terlalu lebar jalan raya masih saja dimanfaatkan beberapa orang untuk membuka lahan tempat berjualan.

Parkir liar ini juga merugikan pendapatan daerah, potensi penerimaan retribusi parkir tepi jalan dapat melebihi target yang telah ditetapkan, namun keberadaan parkir ilegal ini menyebabkan hilangnya potensi tersebut. Parkir yang oleh juru parkir liar ini cukup meresahkan masyarakat, seperti adanya oknum juru parkir yang tidak memberi karcis parkir, seperti tanda pengenal, dan seragam parkir, retribusi melebihi tarif parkir, dan juga adanya oknum yang tidak memiliki kelengkapan parkir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan yang wajib di penuhi oleh seorang juru parkir dalam pengelolaan fasilitas parkir yang menjadi tanggung jawabnya ialah:

- a. Menata parkir kendaraan
- b. Memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan.
- c. Menyerahkan karcis parkir.
- d. Menggunakan pakaian seragam.
- e. Menggunakan tanda pengenalan.
- f. Menjaga keamanan, ketertiban, dan keindahan⁸

Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran berlalu lintas, ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja. Pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membina pengelolaan parkir di wilayahnya, yang merupakan bagian dari fungsi pelayanan umum.

Adapun tempat yang disediakan oleh jasa parkir liar tanpa adanya izin dari dinas perhubungan selaku pelaksana kebijakan. Tempat parkir yang digunakan oleh juru parkir liar ini juga menekan tarif yang cukup tinggi tidak sesuai dengan standar tarif yang telah diatur dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, yang dimana pasal 8 ayat 1 yaitu

⁸ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru



kendaraan roda 2 pada zona 3 adalah Rp.1000 dan kendaraan roda 4 adalah Rp. 2000.⁹

Selama ini yang dibahas dalam aspek perparkiran hanya masalah tarif tetapi tidak mengkaji aspek lain misalnya tentang lahan-lahan yang dibolehkan atau tidak diperbolehkan di gunakan untuk parkir, dan perlunya penambahan lahan parkir oleh pemerintah daerah untuk menciptakan kualitas parkir yang efisien. Dengan banyaknya juru parkir yang beroperasi di ruas-ruas jalan Pekanbaru sekarang saja, sudah mulai di rasakan adanya permasalahan transportasi seperti seringnya kita melihat lalu-lalang kendaraan bermotor yang memadati jalanan, kemacetan di berbagai ruas jalan yang diakibatkan parkir yang semrawut yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam bidang Perparkiran Kota Pekanbaru Diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 Tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata letak unit pelaksana teknis perparkiran pada dinas perhubungan kota pekanbaru. Pada Pasal 5 Menyatakan bahwa :

Pasal 5

1. Kepala UPT. Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan di bidang perhubungan sub urusan pengelolaan parkir.
2. Kepala UPT. Perparkiran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

⁹ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tetang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengeolalaan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di wilayah Kota Pekanbaru.
- b. Pelaksanaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir.
- c. Pelaksanaan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan.
- d. Pelaksanaan tugas bersama dengan perangkat kerja atau instansi terkait dalam pengaturan serta penyelenggaraan perparkiran.
- e. Pelaksanaan pengupayaan Standar Pelayanan Minimal pada kegiatan perparkiran.
- f. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perparkiran.
- g. Pelaksanaan pengaturan, dan pengawasan kendaraan bermotor yang menggunakan jasa perparkiran.
- h. Pengaturan pelaksaasn mekanisme pungutan retribusi parkir.
- i. Pelaksanaan penyerahan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke kas Daerah.
- j. Pelaksanaan pembuatan dan penyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan perparkiran.



- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya.¹⁰

Dinas Perhubungan di bantu Kepala UPT. Perparkiran dalam menjalankan tugasnya untuk mengamankan dan mentertibkan masalah tentang parkir liar. Tarif parkir diatur menggunakan Peraturan Daerah (Perda) dan dapat dikuatkan dengan adanya Peraturan Walikota dengan hirarki tertinggi yaitu adalah Perda. Tarif parkir yang berubah ubah dan juga ketidak jelasan peraturan tentang tempat parkir yang dapat dijadikan lahan parkir yang juga tidak sesuai dengan Perda dan Perwako sangat merugikan kas Daerah. Keberadaan parkir liar yang mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan daerah harus ditanggapi dengan cepat.

Pemerintah Kota hendaknya persuasif dan proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang bijaksana. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat luas. Penanggulangan parkir liar oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan publik sehingga harus menimbulkan dampak yang bisa dinikmati. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, memerlukan suatu strategi yang baik dalam menanggulangi parkir liar di Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan dapat melakukan upaya dalam menanggulangi parkir liar yang cukup mengganggu keindahan kota.

Dilihat dari sisi kebijakan Perparkiran di Kota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 Tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis perparkiran pada dinas perhubungan

¹⁰ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata cara kerja unit pelaksana teknis perparkiran pada dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota pekanbaru belum berjalan efektif hal tersebut dapat dibuktikan ketika hadirnya masalah-masalah adanya aktivitas parkir liar, juru parkir tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi parkir sehingga kebijakan perparkiran tidak bisa terealisasi dengan baik dan masyarakat tidak bisa merasakan fasilitas perparkiran yang bertujuan mempermudah kelancaran lalu lintas, terjadinya masalah pungli karena para juru parkir tidak menyetorkan pendapatannya membayar retribusi dan sepenuhnya pendapatan tersebut akan kembali semuanya menjadi pendapatan pribadi mereka.

Maka dari itu adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dilakukanya evaluasi kebijakan untuk melihat bagaimana keberhasilan kebijakan tersebut sudah berjalan dengan efektif atau belum. Begitu pula evaluasi kebijakan perparkiran yang ada di Kota Pekanbaru perlu dilakukanya evaluasi karena masalah parkir liar masih ada di suudt-sudut Kota Pekanbaru.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari yang dipermasalahkan, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti yaitu: “Pengawasan terhadap parkir liar di Sukaramai Trade Centre oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis perparkiran pada dinas perhubungan kota pekanbaru”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan terhadap parkir liar di Sukaramai Trade Centre oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis perparkiran pada dinas perhubungan kota pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat pengawasan parkir liar di Sukaramai trade center oleh Unit Pelaksana Teknis perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan terhadap parkir liar di Sukaramai Trade Centre oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis perparkiran pada dinas perhubungan kota pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengawasan parkir liar di Sukaramai trade center oleh Unit Pelaksana Teknis perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Manfaat Teoritis:
 - a. Sebagai media pembelajaran metode penulisan hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis khususnya terhadap upaya Unit Pelaksana Tugas Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap parkir liar.
 - c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penulisan berikutnya.
3. Manfaat Praktis
 - a. Dapat ditemukan berbagai persoalan yang dihadapi dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Tugas Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap parkir liar di Sukaramai Trade Center di Jl. Sudirman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dapat diketahui penerapan tugas pengawasan parkir liar oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru di Sukaramai Trade Center Jl. Sudirman.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan.¹¹ Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

2. Lokasi penelitian

Lokasi di adakan penelitian ini adalah di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan juga di Sukaramai Trade Centre (ramayana) Jl. Sudirman, dengan alasan dan pertimbangan mengambil lokasi ini, karena penulis ingin mengetahui bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran dinas Perhubungan terhadap parkir liar yang terjadi.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 52

3. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.¹² Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,¹³ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 30

¹³Ibid, hlm. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifat yang sama.¹⁴ Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam pelaksanaan perpustakaan di Sukaramai Trade Center Jl. Sudirman Pekanbaru. Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan jumlah populasi sebanyak 18 orang yang terdiri dari yaitu 1 orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 1 orang Kasubag TU atau fungsional umum / pengawas UPT Perpustakaan, dan 16 orang juru parkir di Sukaramai Trade Center.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.¹⁶ Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 1 orang Kasubag TU atau fungsional umum / pengawas UPT Perpustakaan, dan 6 orang juru parkir di depan Sukaramai Trade Center Jl. Sudirman Pekanbaru.

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 118

¹⁵*Ibid*, hlm. 119

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002) hlm. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

NO	Bagian atau Jabatan	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
2.	Kasubag TU atau fungsional umum / pengawas UPT Perparkiran	1 orang	1 orang	100%
3.	Juru parkir di Sukaramai Trade Center Jl. Sudirman Pekanbaru	16 orang	3 orang	15%

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan,
dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati,¹⁷ dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

¹⁷Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) hlm. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

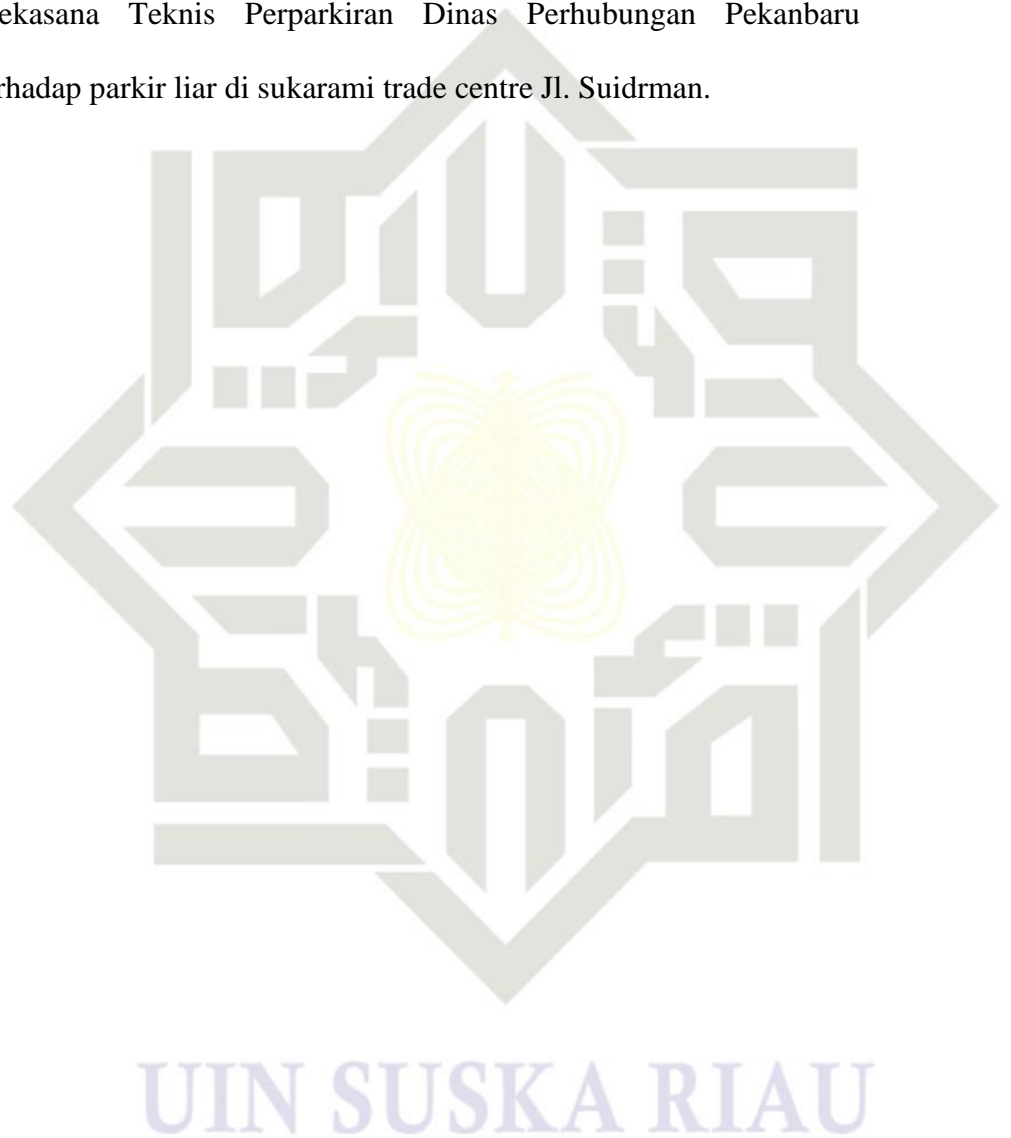
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang di peroleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola

¹⁸Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2014) hlm. 53

dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai Pengawasan Unit Plekasana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Pekanbaru terhadap parkir liar di sukarami trade centre Jl. Suidrman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Perhubungan berdiri pada tanggal 28 oktober 1988 sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat disektor perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembangunan nasional.

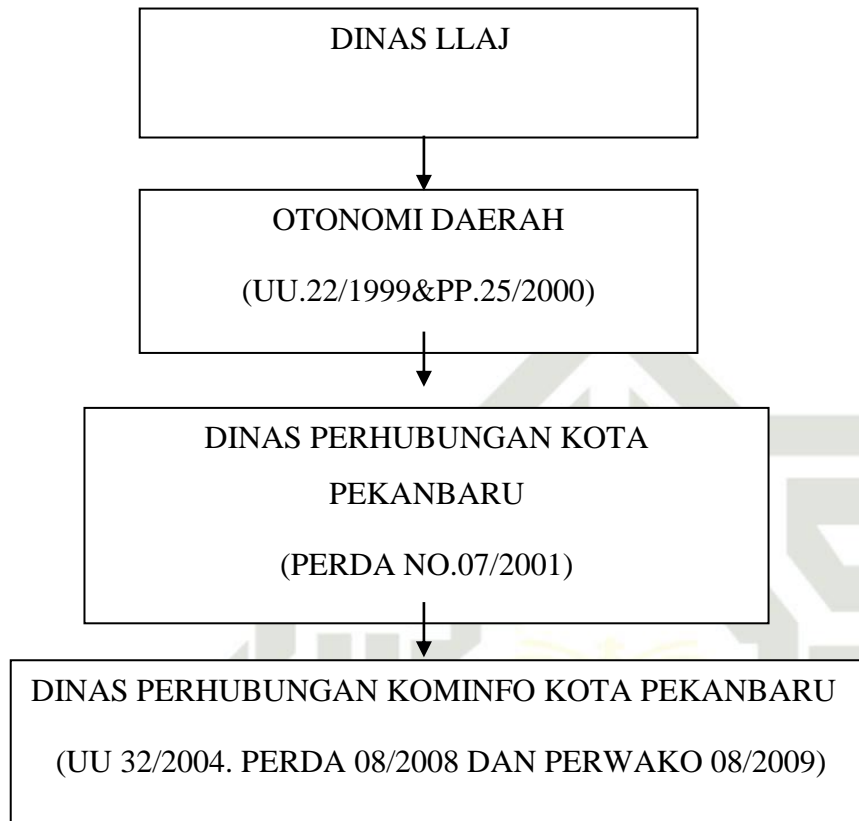
Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan), kemudian adanya undang-undang No.22 Tahun 1999 dan PP No.25 Tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah terbitlah perda No.7 Tahun 2001 membuat dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, penyempurnaan UU No.22 Tahun 1999 oleh UU No.32 Tahun 2004 serta PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda No.8 Tahun 2008 dan Perwako No.8 Tahun 2009 akhirnya mengganti nama dinas ini menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru atau Dishub Kominfo Kota Pekanbaru.¹⁹

¹⁹ Dokumentasi *Profil Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru*. 2014. HI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1



B. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :²⁰

VI :

Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyediaan jasa transportasi, perhubungan darat, laut, udara, dan telekomunikasi, yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.

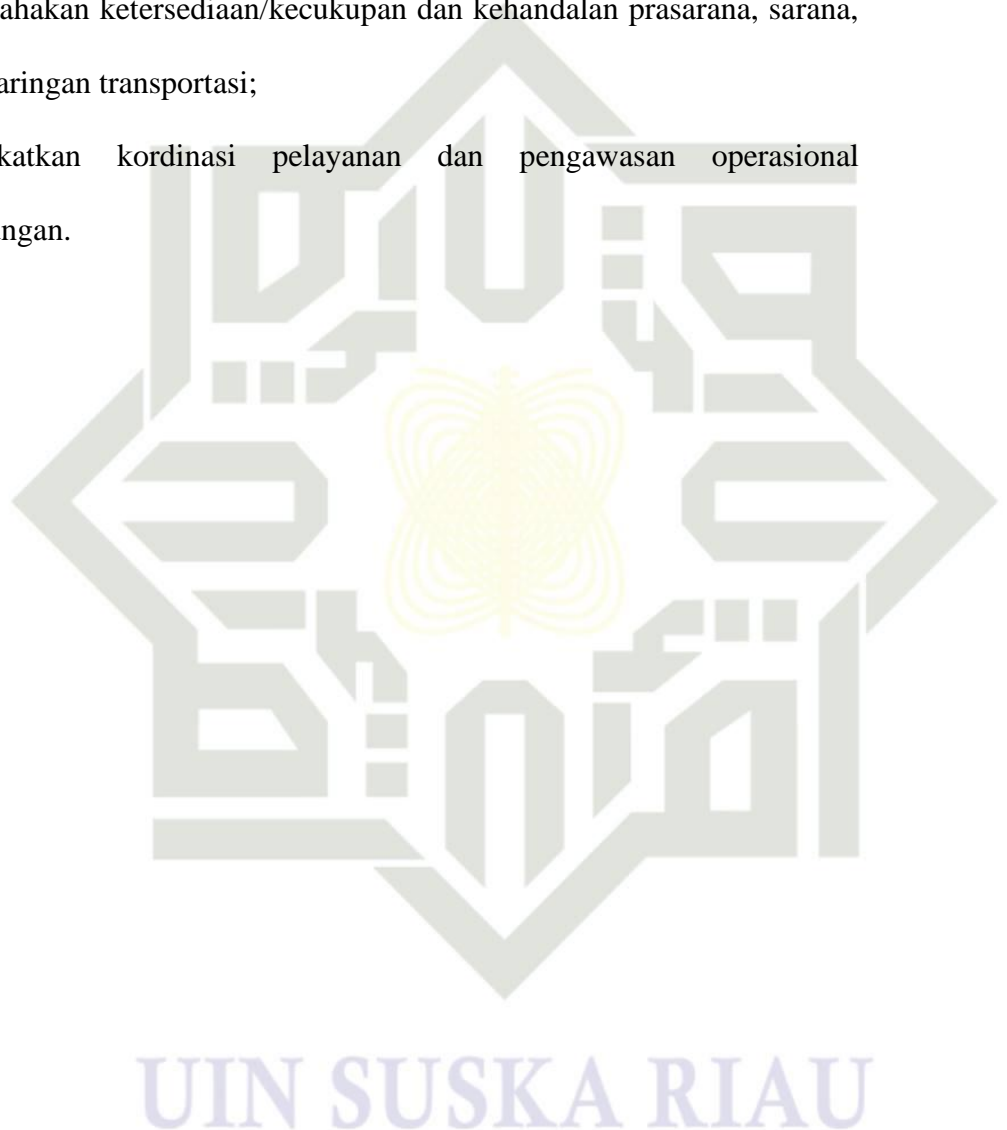
MI :

²⁰ <http://dishub.pekanbaru.go.id/> diakses pada tanggal 24 Mei 2021, Pukul 20:00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

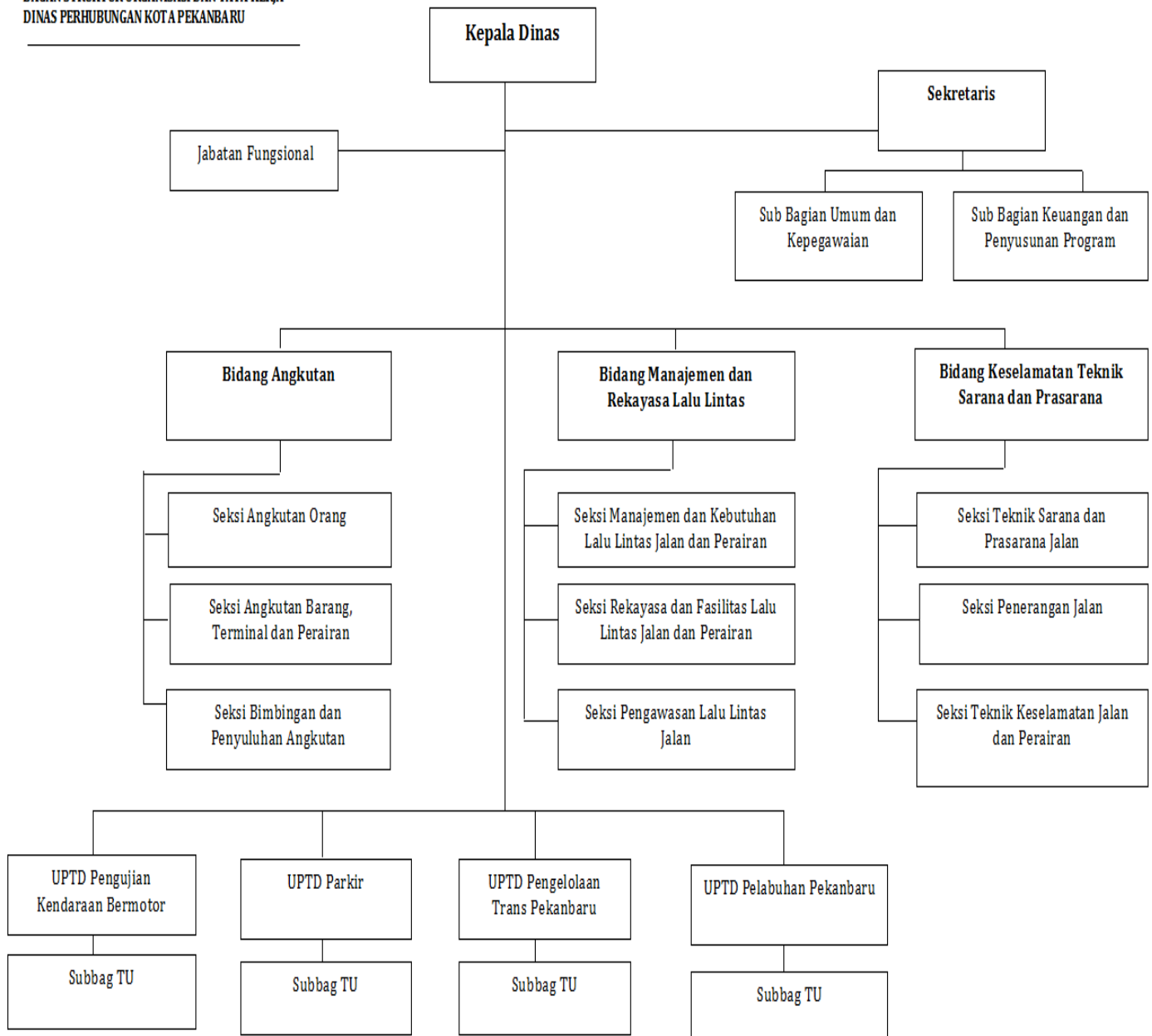
1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan kordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.



C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota pekanbaru

Tabel 2.2

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan merealisasikan misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru perlu ditetapkan kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan. Sejalan dengan perkembangan teknologi maka selain memajukan bidang transportasi, bidang komunikasi dan informatika juga memberikan andil yang besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ketersediaan sistem jaringan telekomunikasi yang handal dan ketersediaan informasi yang akurat serta dapat dipercaya akan sangat membantu kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya dan daerah pada khususnya.

E. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka sejumlah tujuan dan sasaran yang lebih terarah juga perlu ditetapkan. Adapun tujuan dan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Perhubungan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sektor Perhubungan dan Kesekretariatan;
2. Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
3. Melaksanakan Rehabilitas/ pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
4. Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Angkutan;
5. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
6. Tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai;
7. Optimalnya kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Terlaksananya kegiatan penataan tower di Kota Pekanbaru.

Sedangkan sasaran dan yang ingin dicapai adalah :

1. Aparatur Perhubungan yang profesional;
2. Terencana dan temonitornya penyelenggaraan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
3. Terpeliharanya peralatan beserta pengujian, pelabuhan dan terminal serta sarana dan prasarana perhubungan;
4. Terjadinya peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat;
5. Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum, penataan dan pengembangan koridor Trans Metro, pembamgungan Halte Bu dan Pengadaan Bus, Terminal Barang, Pelabuhan Tenayan, Kantor Perngujian Kendaraan Bermotor, Gedung Parkir dan Penataan Pedestrian Sudirman;
6. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan pagar pengaman jalan;
7. Pengadaan Alata Pengujian Kendaraan Bermotor dan Mobil Crane;
8. Tersedianya menara telekomunikasi yang dimanfaatkan secara bersama dengan tatanan yang teratur dalam ruang wilayah kota.

UIN SUSKA RIAU

F. Produk Hukum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Produk hukum Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Pekanbaru adalah sebagai berikut:²¹

1. Perda No.14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
2. Perda No. 15 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan LLAJ;
3. Perda No. 06 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Pelabuhan;
4. Perda No. 05 Tahun 2004 tentang Kepelabuhan dan izin Kepelabuhan;
5. Perda No. 02 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
6. Perda No. 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat;
7. Perda No. 09 Tahun 2009 tentang Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 238 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
9. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 240 Tahun 2005 Tentang Penetapan Trayek dan Kode Trayek dan Warna Angkutan Kota dalam Kota Pekanbaru.
10. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 34 Tahun 2013 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.16 tahun 2013.
11. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015.

²¹ Dokumentasi *Profil Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru*.2010.H7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ### 3. Fungsi
- Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

4. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan barang dan jasa di bidang Industri dan Perdagangan.
- b. Mendorong penyelenggaraan barang kemitraan industri kecil, menengah dan sektor ekonomi lainnya.
- c. Penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- d. Penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral.
- e. Penyelenggaran distribusi bahan pokok.
- f. Pemberian izin industri dan kawasan Indsutri.
- g. Pemberian periziinan dibidang indsutri dan Perdagnagn, termasuk izin kawasan industri.
- h. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan keterampilan pengerajin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam dalam oengembangan usaha.
- j. Pengendalian pencemaran limbah industri.
- k. Pengawasan dan pengendalian industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan moral.
- l. Fasilitas kegiatan distribusi bahan pokok.
- m. Penetapan tera dan tera isi ulang alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perdagangan)
- n. Pemberian izin Gudang.
- o. Penertiban SKA (Surat Keterangan Asal) barang.
- p. Memfasilitasi pemodalan, aspek pemodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan dan perniagaan, pemasaran untuk tubuh dan berkembangnya koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM)
- Q. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan industri dan perdagangan Daerah.
- r. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Industri dan Perdagangan yang wajib dilaksanakan oleh Kota.
- s. Penyusunan rencana industri dan Perdagangan Daerah.
- t. Perizinan di bidang industri dan Perdagangan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- u. Penyelenggaraan ekspor dan impor hasil produk Industri dan Perdagangan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- v. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa Industri dan Perdagangan.
- w. Penyelenggaraan sistem Industri dan Perdagangan.
- x. Penyelenggaraan promosi Industri dan Perdagangan.
- y. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama Industri dan Perdagangan.
- z. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah.

H. Sejarah Sukaramai Trade Centre (Plaza Ramayana)

Plaza Sukaramai adalah salah satu Pusat perbelanjaan terbesar di Pekanbaru. Memiliki Ramayana Departement Store . Luas area sekitar 6000m² yang berada di Jl. Jenderal Sudirman, tepatnya di Pasar Pusat, Sekitar 8 KM dari Bandara Sultan Syarif Kasim II, dan sangat dekat dengan Kantor Pusat Pemerintahan dan Bank - Bank besar yang ada di Propinsi Riau. Dibangun dan dioperasikan oleh PT. Makmur Papan Permata.

Plaza Sukaramai adalah tempat berbelanja yang tidak asing lagi bagi masyarakat Pekanbaru. Plaza Sukaramai berdiri pada tahun 1996. Awal mulanya Plaza Sukaramai ini adalah Pasar Pusat yang tradisional dengan seiring berjalan nya waktu, pemerintah berfikir ulang untuk menjadikan pasar pusat sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pusat perbelanjaan yang lebih modern. Maka pemerintah mengadakan peremajaan dengan bekerja sama kepada Developer yaitu Pt. Makmur Papan Permata. Pemilik dari lahan Plaza Sukaramai ini adalah Pemerintah Daerah Pekanbaru. Lalu mencari investor untuk menanamkan sahamnya terhadap Plaza Sukaramai ini.

Visi Misi Sukaramai Trade Centre

VISI

Menjadi perusahaan nasional dengan jaringan pusat perbelanjaan (shopping mall) di Kota Kabupaten/Kodya, yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat sekitarnya dengan harga termurah dibanding para pesaingnya, serta menyediakan tempat usaha bagi UMK/Usaha Mikro Kecil yang ingin mengembangkan usahanya untuk bertumbuh bersama.

MISI

Untuk mewujudkan visi diatas maka Group MPP menjalankan 6 bidang usaha yaitu :

- a. Menyelenggarakan aktifitas usaha berupa pusat perbelanjaan (shopping mall) dengan menyediakan ragam produk yang lengkap dengan kualitas dan harga bersaing, serta pemberian pelayanan yang prima melalui bentuk pelayanan yg kooperatif dan berkarakter.
- b. Menyediakan tempat usaha bagi masyarakat (UMK/ Usaha Mikro Kecil) yang ingin mengembangkan usahanya melalui kemitraan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertumbuh kembang bersama.

- c. Menjadikan perusahaan sebagai suatu badan usaha yang dapat dipercaya oleh stake holders maupun share holders dengan selalu memberikan yang terbaik melalui penerapan GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha.
- d. Menjadikan perusahaan sebagai bagian bagi karyawan dengan menciptakan pendidikan, pelatihan dan sistem karir yang memungkinkan karyawan untuk berkembang serta memberikan kesejahteraan kepada karyawan sesuai dengan standard industri retail.
- e. Memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan masyarakat setempat dalam menyediakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi kerakyatan yang berbasis UMK sejalan dengan perkembangan perusahaan.
- f. Memberikan pelayanan optimal melalui kemudahan akses informasi secara on line bagi pelanggan.

J. Fasilitas Sukaramai Trade Centre

- Parkir yang luas
- Musholla
- Toilet
- Escalator
- Kantor
- Bank
- ATM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pusat

Grosir

Pakaian Melayu & Pakaian Muslim

Lantai Dasar

Retail Shops

Lantai 1

Toko Emas

- Handpone
- Coffee Shop
- Retail Shops
- Vanhollano
- Bakery
- KFC

Lantai 2

Retail Shops

Bakso Lapangan Tembak

Arena Bermain Anak

Coffee Shop

UIN SUSKA RIAU

Lantai 3

Departement Shop (Ramayana)

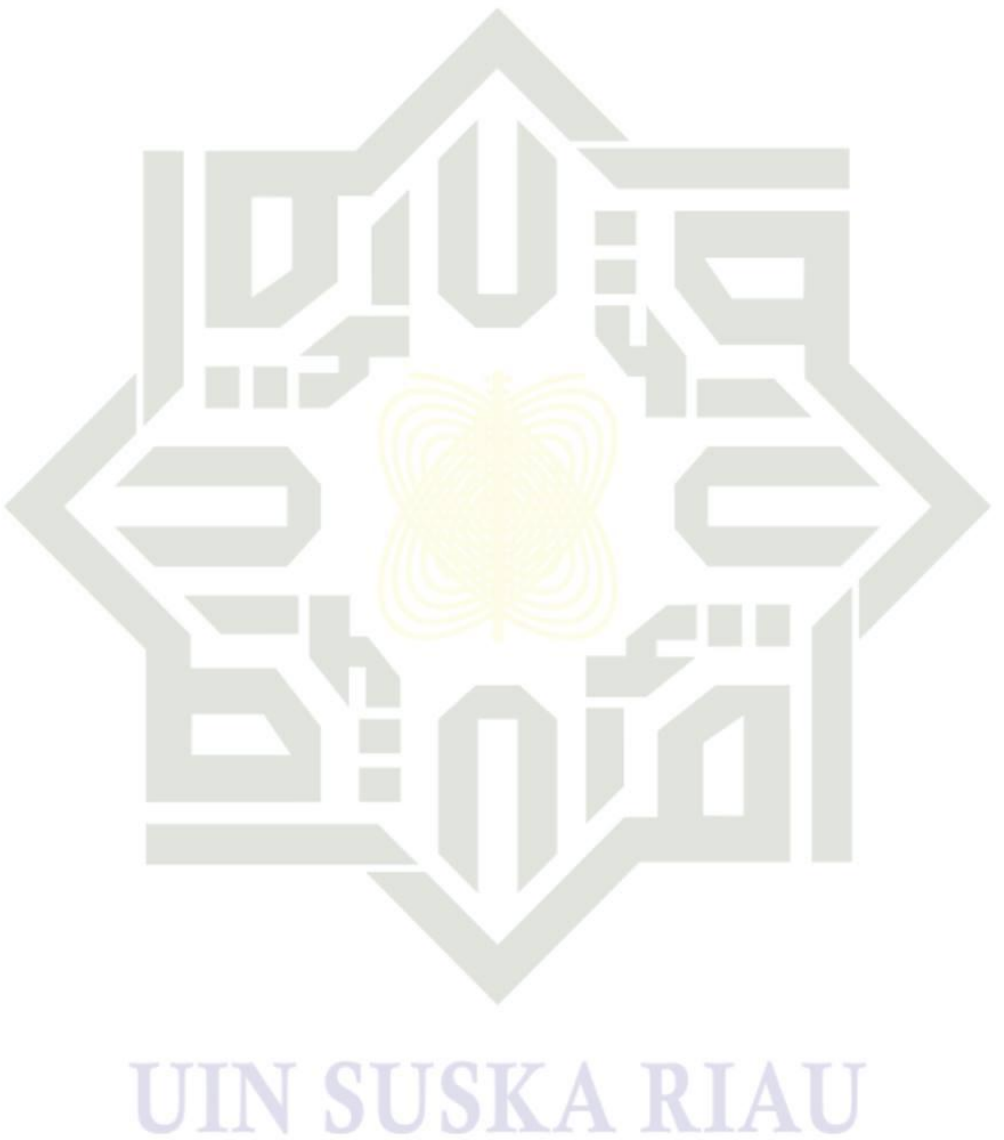
Arena Bermain Anak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Parkir

1. Pengertian Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara. Selain pengertian diatas beberapa definisi tentang parkir, semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang dapat merupakan awal perjalanan dan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia definisi parkir adalah mengehentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Pengertian diatas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu penyedia tempat untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika dilihat dari fungsi perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut Pasal 1694 KUH Perdata.

Menurut isi Pasal 1694 KUH Perdata, penitipan adalah suatu perjanjian “*restitutio*” yang berarti ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diteruskannya barang yang dititipkan.²² Jadi bentuk dari jasa parkir ini tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat terjadinya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Sehingga parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pngemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir disisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas maupun tidak, serta tidak semata mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudian bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh

²² Soedharyo soiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (jakarta : sinar grafika, 1955) hlm. 429

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap pengguna fasilitas yang diusahakan.

1. Jenis Parkir

Setiap perjalanan akan sampai pada tujuannya sehingga kendaraan harus diparkir. Sarana perparkiran merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai tujuan karena kendaraan yang digunakan memerlukan parkir.

Sarana parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi.

a. Parkir menurut penempatannya.

1. Parkir di tepi jalan

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui di kawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir. Keuntungan parkir jenis ini lebih dekat dengan lokasi tujuan.

2. Parkir di daerah perumahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat daro terus meningkatnya volume kendaraan di jalan serta hambatan yang diakibatkan oleh parkir kendaraan seperti terganggunya kelancaran lalu lintas dan penurunan kelas jalan, hampir pada setiap pusat kota kebijaksanaan mengenai perparkiran mutlak diperlukan. Dalam sistem parkir di perumahan, sebenarnya terdapat *disbenefit*/kerugian dari berjejanya parkir disepanjang trotoar jalan, namun hak tersebut tertutupi dengan berkurangnya kecepatan kendaraan akibat keberadaan parkir di jalan tersebut yang secara tidak langsung akan meningkatkan keselamatan bagu penghuni di sekitar jalan tersebut.

Namun pad adaerah pemukiman yang berada dekat dengan pusat kota, kontrol tersebut tetap diperlukan jika kondisi transportasi tetap efektif. Terdapat dua cara kontrol terhadap sistem parkir ini yaitu parkir gratis bagi penghuni (dengan menempelkan tanda tertentu yang dapat berupa stiker dan ditempelkan di kendaraan) dan bayaran dengan kartu yang dicap harian.

3. Parkir di pusat kota, tidak dikontrol (*uncontrolled*) terdapat beberapa macam alternatif cara parkir kendaraan yaitu :

a. Paralel terhadap jalan

Parkir sejajar dimana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik dari sisi kiri jalan atau sisi kanan jalan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan. Parkir paralel adalah cara paling umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan untuk parkirmonil pinggir jalan. Cara ini juga digunakan dipelataran parkir ataupun gedung parkir khussunya untuk mengisi ruang parkir yang parkir serong tidak memungkinkan.

b. Tegak lurus terhadap jalan

Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotiar, atau dinding. Jenis mobil ini parkir lebih terukur daripada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat di pelataran parkir atau gedung parkir.

Untuk jalan yang tidak terlalu lebar, dapat digunakan sistem paralel. Sistem diagonal sebenarnya dapat menampung lebih banyak mobil tetapi untuk itu disepanjang pinggiran jalan harus diperkeras. Parkir diagonal memang tidak umum, namun sebenarnya dapat menampung lebih banyak kendaraan. Di sisi lain, cara ini juga akan banyak mengurangi lebar jalan. Kesulitan lainnya adalah waktu untuk keluar dari areal parkir (*manuver*) yang akan memakan waktu lebih lama jika dibandingkan dengan sistem parkir paralel. Parkir paralel adalah cara parkir kendaraan paralel dipinggir jalan, umumnya merupakan fasilitas parkir yang biasanya diterapkan di pusat kota, ataupun di kawasan pemukiman yang tidak memiliki garasi. Melakukan parkir paralel merupakan keahlian paling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sulit dalam mengemudikan kendaraan sehingga dijadikan salahsatu aspek yang diujikan pada saat ujian praktek untuk mendapatkan SIM, sehingga ini juga menjadi salah satu pelajaran yang diberikan dalam sekolah mengemudikan kendaraan. Sampai saat ini nampaknya parkir paralel dirasakan paling tepat karena selain tidak terlalu banyak memakan tempat untuk *manuver* juga jauh lebih sedikit merengambil lebar jalan dan kecil kemungkinan menyebabkan kecelakaan.

4. Parkir di pusat kota, terkontrol (*controlled*)

Ada tiga jenis metode kontrol yang dapat dipergunakan oleh perencana transportasi :

- a. Pembatasan waktu parkir petunjuk umum yang dapat digunakan untuk pembatasan waktu lamanya parkir adalah : 1. 1 (satu) jam untuk daerah perkotaan. 2. 2 (dua) jam untuk daerah pinggiran dan sekitarnya. 3. 10-20 menit di daerah tertentu misalnya seperti Bank dan kantor pos
- b. *Disc parking* dengan sistem ini pemilik kendaraan diminta untuk mempergunakan kartu disc yang memperlihatkan waktu kedatangan kendaraan pada ruang parkir.
- c. Parkir meter terdiri atas jam pengukur waktu, dimana jam berfungsi untuk mengukur lamanya parkir tersebut berputar sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Jadi seolah-olah sipemarkir membeli waktu pada ruang parkir tersebut. Alat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengukur tersebut disamping memperhatikan pembatasan waktu, sekaligus mengumpulkan uang pula.

5. Parkir di luar jalan (*off street parkirng*)

Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan / *off street parking* menjadi pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan yaitu :

1. Pelataran parkir

Pelataran parkir adalah daerah, kawasan terbuka yang digunakan untuk memarkir kendaraan, disebut juga taman parkir. Pelataran parkir merupakan yang sangat penting di pusat perdagangan, perkantoran, stadion olahraga, pasar, sekolah untuk memarkir kendaraan, sementara pemiliknya melakukan kegiatan belanja, bekerja ataupun kegiatan lainnya.

2. Gedung parkir bertingkat

Parkir bertingkat menyita lahan di pemukiman bumi sedikt, tetapi menafatkan ruang diatasnya yang lebih besar. Dengan memanfaatkan parkir bertingkat untuk kendaraan roda empat di berbagai kota besar Tanah-Air dan Mancanegara, banyak lahan si permukiman bumi dapat dialihkan menjadi hijauan tanaman yang dibutuhkan untuk mengenai pemanasan global (*global warming*) yang telah menimbulkan perubahan iklim di permukaan bumi.

b. Parkir menurut jenis kendaraannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut jenis kendaraan yang diparkir, terdapat beberapa macam parkir yang bertujuan mempermudah pelayanan, yaitu :

1. Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda).
 2. Parkir untuk becak, andong dan dokar.
 3. Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor).
 4. Parkir untuk kendaraan roda tiga, empat atau lebih dan bermesin (bemo, mobil, truk dan lain-lain).
- c. Parkir menurut tujuanya
1. Parkir penumpang yaitu parkir untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
 2. Parkir barang yaitu parkir untuk bongkar/muat barang. Keduanya sengaja dipisahkan agar satu sama lain masing-masing kegiatan tidak saling menunggu.
- d. Satuan Ruang Parkir

Suatu "Satuan Ruang Parkir (SRP)" adalah tempat parkir untuk satu kendaraan. Pada tempat di mana parkir dikendalikan, maka tempat parkir harus diberi marka pada permukaan jalan. Tempat tambahan diperlukan bagi kendaraan untuk melakukan alih gerak, dimana hal tersebut tergantung dari sudut parkirnya. Sudut parkir dipilih atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

Pada jalan-jalan yang lebarnya kurang, hanya parkir sejajar saja yang dapat digunakan, karena parkir bersudut kurang aman jika dibandingkan dengan penggunaan parkir sejajar untuk suatu daerah kecepatan kendaraan yang tinggi. Parkir bersudut hanya diperbolehkan pada jalan jalan kolektor dan lokal yang lebar yang kapasitasnya mencukupi.

2. Kondisi jalan dan lingkungan

Makin besar sudut yang digunakan maka semakin kecil luas daerah masing-masing tempat parkirnya, akan tetapi makin lebar pula lebar jalan yang diperlukan untuk membuat lingkaran membelok bagi kendaraan yang memasuki tempat parkir.

Penentuan Satuan Parkir (SRP) dibagi atas tiga jenis kendaraan dan berdasarkan penentuan SRP diklasifikasikan menjadi tiga, seperti terlihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 3.1

Penentuan Satuan Ruang Parkir²³

NO	Jenis Kendaraan	Satuan Ruang Parkir
1.	a. Mobil penumpang untuk golongan I	2.30×5.00
	b. Mobil penumpang untuk golongan II	2.50×5.00
	c. Mobil penumpang untuk golongan III	3.00×5.00
2.	Bus / Truk	3.40×5.00
3.	Motor	0.75×5.00

3. Ketentuan Penggunaan Parkir Pada Badan Jalan.

Badan jalan digunakan sebagai mana mestinya yaitu sebagai media dalam sistem transportasi juga mempunyai peruntukan lain yaitu digunakan sebagai tempat parkir. Menggunakan sisi jalan sebagai tempat parkir adalah murah, akan tetapi masalah keselamatan akan selalu timbul dimana kendaraan yang diparkir di sisi jalan tersebut merupakan salah satu faktor utama dari 50% kecelakaan yang terjadi di tengah ruas jalan di daerah perkotaan hal ini dikarenakan

²³ Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan

Benmotor di Jalan(1995) hlm. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkurangnya kebebasan pandangan, kendaraan berhenti atau keluar dari tempat parkir di depan kendaraan kendaraan yang lewat secara mendadak.²⁴

Bila permintaan parkir melampaui penawaran akan dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas. Dalam hal yang demikian diperlukan suatu sistem pengendalian dan penindakan, agar pemakain ruang yang tersedia dapat dilakukan secara bersama-sama, dialokasikan baik untuk kendaraan pribadi, kendaraan barang ataupun angkutan umum, dan dibatasi hanya untuk kategori tersebut saja (misalnya bongkar muat barang tidak boleh digunakan oleh kendaraan pribadi).

Penggunaan badan jalan yang juga ditujukan sebagai ruang parkir kendaraan hanya dapat dilakukan pada jalan "kolektor" dan jalan "lokal" dengan memperhatikan kondisi jalan dan lingkungan, kondisi lalu lintas dan aspek keselamatan, ketertiban kelancaran lalu lintas.²⁵

Dalam menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir terdapat beberapa ketentuan yang sifatnya memberi batasan yaitu berupa larangan terhadap penggunaan lahan tersebut, yaitu :

²⁴ Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (1995) hlm. 113

²⁵ Ibid, hlm. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pada daerah dimana kapasitas lalu lintas diperlukan, dimana lebar jalan secara keseluruhan dibutuhkan untuk mengalirkan lalu lintas.
- b. Pada daerah dimana akses jalan masuk ke lahan sekitarnya diperlukan.
- c. Dijalan daerah persimpangan dengan jarak minimum absolut 10-25 m. jarak-jarak ini dikombinasikan dengan pertimbangan terhadap keselamatan (jarak pandang), pembatasan kapasitas (pengurangan lebar jalan), dan lintasan membelok dari kendaraan-kendaraan yang besar.
- d. Dalam jarak 6 m dari suatu penyebrangan jalan kaki.
- e. Sepanjang 25 m sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 m.
- f. Sepanjang 6 m sebelum dan sesudah akses bangunan gedung.
- g. Sepanjang 50 m sebelum dan sesudah jembatan, 25 m sebelum dan sesudah perlindungan sebidang (*cross section*) dan terowongan.
- h. Dalam jarak 6 m sebelum dan sesudah dari sumber air (*hydrant*) pemadam kebakaran.
- i. Sepanjang jarak 100 m sebelum dan sesudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persimpangan sesudah rel kereta api.

- j. Selanjutnya parkir ganda atau parkir diatas trotoar tidak diperbolehkan.

Untuk memanfaatkan parkir yang menggunakan sebagai tepi badan jalan, tidak semua fungsi jalan dapat digunakan sebagai tempat parkir. Pada Tabel 2.2 berikut akan ditunjukkan penggunaan jalan sebagai dengan fungsinya yang dapat digunakan sebagai tempat parkir

Tabel 3.2

Penggunaan Sebagian Badan Jalan Sebagai Tempat Parkir

	Jalan bagi pejalan kaki	Jalan akses / lingkungan	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Jalan Arteri
Aktivitas utama	Jalan bertemu dagang	Jalan kendaraan yang memotong antar barang, kendaraan kecepatan rendah	Pergerakan kendaraan dekat awaln atau akhir perjalanan, terdapat pemberhentian bus	Lalu lintas jarak menengah menuju jaringan jalan utama, pelayanan angkutan umum, lalu lintas menerus	Lalu lintas jarak jauh kecepatan tinggi, tidak ada pejalan kaki atau akses langsung
Kendaraan yang berhenti (parkir)	Tidak ada kecuali kendaraan darurat	Dibatasi dipengaruhi keselamatan	Cukup banyak apabila fasilitas diluar jalan tidak disediakan	Diperkenankan apabila kondisi lalu lintas memungkinkan	Tidak ada
Aktivitas	Kendaraan	Untuk	Lalu lintas	Lalu lintas	Cocok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angkutan barang	barang yang memasok kegiatan perdagangan	keperluan penghuni saja	terusan minimal	terusan minimal	untuk pergerakan mobil barang
Pergerakan pejalan kaki	Kebebasan mutlak bagi pejalan kaki	Bebas berjalan dan menyebrang pada sembarang tempat	Dikendalikan misalnya zebra cross	Aktifitas pejalan kaki minimal, dilengkapi pengaman	Tidak ada pemisahan tidak sebidang antara pejalan kaki dengan kendaraan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan badan jalan sebagai ruang parkir adalah :

1. Lebar jalan.
2. Volume lalu lintas pada jalan yang bersangkutan
3. Karakteristik kecepatan
4. Dimensi kendaraan
5. Sifat peruntukan lahan sekitarnya dan peranan jalan yang bersangkutan.

Dalam menentukan sudut parkir pada suatu jalan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Di mana perbedaan tersebut dikarenakan oleh fungsi jalan dan arah gerak lalu lintas pada jalan yang bersangkutan. Standar yang dapat digunakan pada penentuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudut yang dapat digunakan dan lebar jalan efektif pada masing-masing jenis jalan, seperti terlihat pada Tabel 2. berikut :

Tabel 3.3

Lebar Minimum Jalan Kolektor Satu Arah Untuk Parkir Pada Badan Jalan

Kriteria			Parkir			Satu Lajur		Dua Lajur	
Sudut Parkir	Lebar Ruang Parkir A (m)	Ruang Parkir Efektif M (m)	Ruang Manuver M (m)	D h M (E) (m)	D h M – J (m)	Lebar Jalan Efektif L (m)	Lebar Total Jalan W (m)	Lebar jalan Efektif	Lebar Total Jalan W (m)
0	2,3	2,3	3,0	5,3	2,8	3,5	6,3	7,0	9,8
35	2,5	4,5	2,9	7,4	4,9	3,5	8,4	7,0	11,9
45	2,5	5,1	3,7	8,8	6,3	6,5	9,8	7,0	13,3
60	2,5	5,3	4,6	9,9	7,4	3,5	10,9	7,0	14,4
90	5,5	5,0	5,8	10,8	8,3	3,5	11,8	7,0	15,3

e. Pengendalian Parkir

Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan kegiatan parkir. Pembatasan kegiatan parkir dilakukan terhadap parkir di pinggir jalan yang diterapkan terutama di jalan-jalan utama dan pusat-pusat kota. Kebijakan ini akan sangat efektif untuk meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan atau untuk menyeimbangkan antara permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prmbangunan prasarana dan perawatan fasilitas yang ada.²⁶

Pada umumnya semakin dekat arah pergerakan menuju pusat kota , akan semakin banyak menemui hambatan-hambatan pada saat mengemudikan kendaraan. Hambatan- hambatan tersebut disebabkan oleh semakin besarnya tingkat kegiatan kegiatan yang ada, dimana salah satu penghambat yang penting adalah parkir di pinggir jalan. Berbeda dengan pergerakan menuju arah yang keluar dari pusat kota, yaitu semakin ke jauh dari pusat kota semakin sedikit pula hambatan-hambatan yang ditemui.

f. Tujuan Pengendalian Parkir

Sejauh ini, aspek yang dibahas dari pengendalian parkir adalah dengan orientasi komersil. Sedangkan tujuan dari pengendalian parkir itu sendiri adalah :

1. Mencegah terjadinya hambatan arus kendaraan
2. Mengurangi kecelakaan
3. Membuat penggunaan tempat parkir lebih efektif
4. Bertindak sebagai mekanisme pembatas terhadap penggunaan jalan di daerah yang padat
5. Memelihara benda sejarah, sekiranya berada di suatu kota

²⁶ 1 Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jala n (1995) hlm. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan nilai sejarah yang tinggi.

Saat ini bahkan pengendalian parkir merupakan satu-satunya metode untuk membatasi pergerakan kendaraan yang dapat dilakukan oleh seorang perencana sistem transportasi yang komperhensif dan terintegrasi. Dulu, pengendalian parkir diterapkan terutama untuk mengurangi hambatan kendaraan dan untuk memungkinkan jalan menjadi lebih baik dalam memenuhi permintaan lalu lintas, dengan mengganti parkir di jalan (on street parking) menjadi parkir di luar jalan (off street parking).

Pengendalian parkir telah dimanfaatkan untuk memepengaruhi demand kota yang terjadi, mencegah orang untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil dan mengalihkannya ke penggunaan transportasi publik. Namun sampai saat ini, pencegahan pembawaan mobil tersebut tidak diterapkan pada semua kendaraan, hanya pada mereka yang memang tidak membutuhkan kendaraan. Seseorang yang hanya mengendarai kendaraannya selama beberapa saat untuk bekerja dengan tingkat isian kendaraan 1,5 orang per mobil, kemudian meninggalkan kendaraannya tersebut sampai dengan waktu yang lama, perlu dicegah pergerakan dengan kendaraan pribadinya tersebut. Bagi mereka yang melakukan perjalanan dan parkir, pencegahan tidak dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi tujuan dari kebijakan perparkiran di pusat kota adalah meningkatkan para pemarkir jangka pendek (misalnya para pemarkir untuk shopping) dan mencegah pemarkir jangka panjang (misalnya komuter).

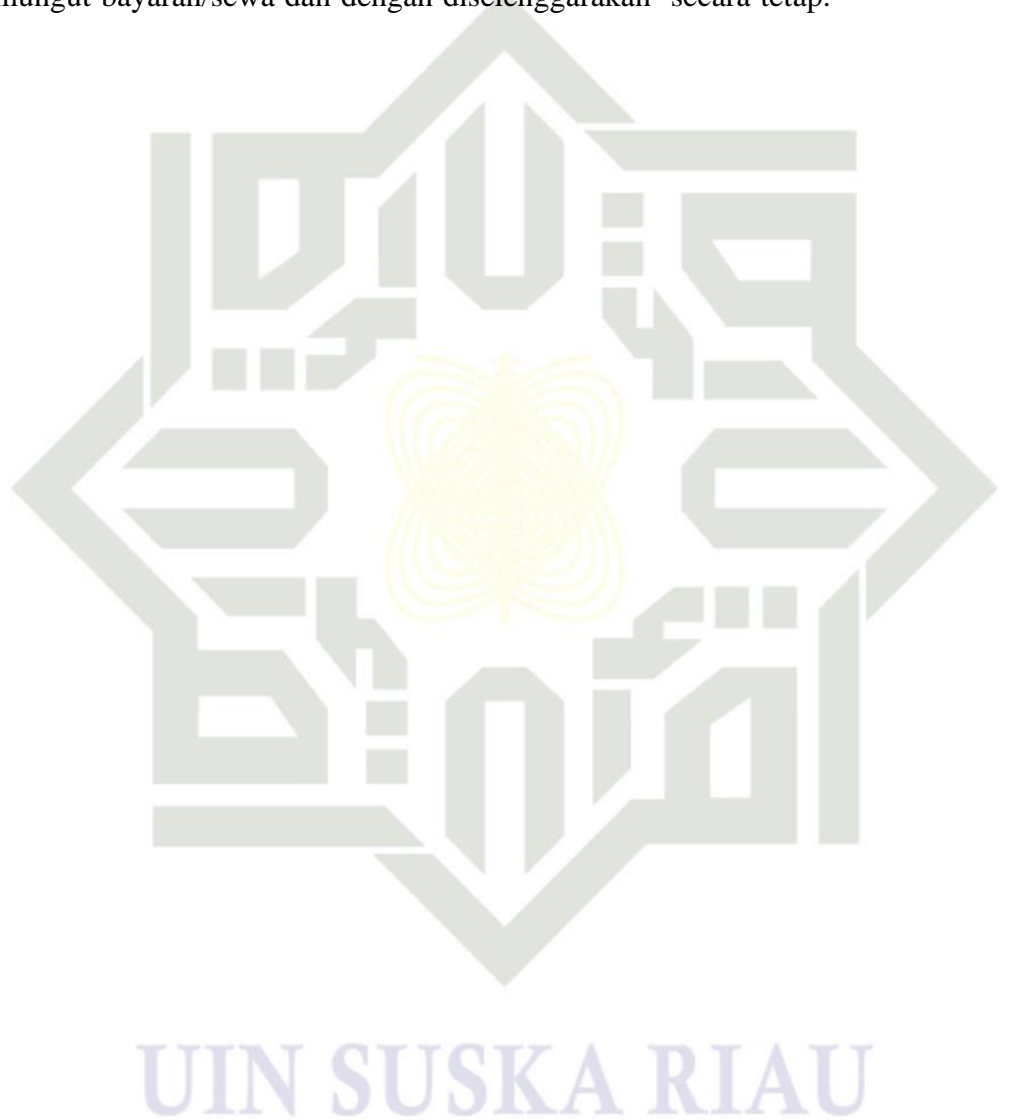
h. Parkir Umum.

Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah, jalan dan lapangan yang memiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tempat parkir umum ini menggunakan sebagian badan jalan umum yang dikuasai atau milik pemerintah yang termasuk bagian dari tempat parkir umum ini adalah parkir ditepijalan umum.

i. Parkir Khusus.

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh pemerintah daerah yang pengelolanya diselenggarakan oleh pihak lain baik berupa badan usaha maupun perorangan. Tempat parkir khusus ini berupa kendaraan bermotor dengan mendapatkan ijin dari pemerintah daerah. Yang termasuk jenis ini adalah gedung parkir, peralatan parkir, tempat parkir gratis dan garasi. Gedung parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan atau bagian bangunan. Peralatan parkir adalah tempat parkir yang tidak memungut bayaran dari pemilik kendaraan yang parkir di suatu

lokasi. Tempat penitipan kendaraan atau garasi adalah tempat/bangunan atau bagian bangunan milik perorangan, pemerintah daerah atau badan hukum yang diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran/sewa dan dengan diselenggarakan secara tetap.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Istilah mengenai pengawasan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” dimana berarti pengawasan adalah aktivitas mengawasi atau mengamati sesuatu dengan teliti. Aktivitas lanjutan dari pengawasan adalah melaporkan hasil pengawasan tersebut. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut dan proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁷

pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir sevara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan kesuatu kawasan yang perlu dibatasi arus lalu lintasnya. Pengawasan parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang parkir guna mempunyai kekuatan hukum untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, sehingga perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Pelaksana pengawasan yang sertai dengan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah yang penting untuk mempertahankan kinerja lalu lintas.

²⁷ Adisasmita raharjo, *menejemn pemerintah*, (yogyakarta : Graha ilmu,2011) hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan segi hukum dan segi kebijaksanaan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi, telah disebutkan diatas, berikut dengan mekanisme dan tolak ukurnya.

Pengawasan adalah suatu proses yang menetapkan terkait hal yang harus dilaksanakan, tujuan dilaksanakannya hal tersebut, dan supaya yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Pengawasan adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kienrja yang telah ditetapkan tersebut.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan akan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengeani sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi

sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.²⁸

2. Prinsip Pengawasan

Bahwa pada prinsipnya pengawasan itu penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas dalam suatu organisasi, baik organisasi usaha maupun organisasi pemerintah, sehingga pengawasan tersebut diadakan dengan maksud untuk yaitu sebagai berikut :

- a. Mengetahui jalanya pekerjaan, apakah lancar atau tidak dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- b. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarnya dan sesuai dengan yang telah direncanakan dan mengetahui hasil kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- c. Mengetahui hasil pekerja dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

²⁸ Mufham Al-amin, Manajemen Pengawasan, (Jakarta : Kalam Indonesia, 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah suatu fungsi dimana tindakan atau proses kegiatan itu dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan, kegagalan, untuk kemudian dilakukan perbaikan dan menjaga agar pelaksanaan berbeda dengan rencana yang ditetapkan. Namun sebaliknya, sebaik apapun rencana yang telah ditetapkan, juga tetap menemukan pengawasan.

Oleh sebab itu diartikan perencanaan dan pengawasan mempunyai hubungan yang sangat erat, diibaratkan seperti kedua sisi mata uang yang sama dan semua fungsi-fungsi dari manajemen mempunyai hubungan yang saling terkait. “pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan telah dilaksanakan secara efektif dan fungsi pengawasan itu sendiri harus diawasi”.

Manullang mengartikan fungsi pengawasan ialah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.²⁹ Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan menghendaki adanya tujuan-tujuan dan rencana-rencana yang belum dibuat. Dalam sebuah pengawasan perlu adanya sebuah standar (alat ukur) guna mengetahui sejauh mana kegiatan atau aktivitas itu terlaksana dan pengawasan merupakan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja,

²⁹ Manullang, *dasar-dasar manajemen*, (medan : ghalia indonesia, 1988) hlm. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar supaya kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk, dan instruksi-instruksi sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

Dengan maksud diatas, maka pelaksanaan pengawasan diharapkan akan membawa hasil yang positif bagi tercapainya tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui proses pekerjaan apakah berjalan lancar atau tidak.
2. Mempernaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengushakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru.
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Untuk dapat mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana sebagaimana yang telah ditetapkan.
5. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan pa yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
6. Memberikan saran dan tindak lanjut pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan dari pejabat yang berwenang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Bentuk-bentuk pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Pendahuluan

Yaitu untuk mengantisipasi penyimpangan standar dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terealisasi.

2. Pengawasan *Concurrent*

Yaitu pengawasan “ya-tidak” , dimana suatu aspek dari prosedur harus memenuhi syarat yang harus ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan

3. Pengawasan Umpan Balik

Yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau yang tidak sesuai dengan standar.

C. Tinjauan Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kenyataan. Penegkan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁰

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

³⁰ Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988) hlm. 32

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dintinjau dari sudut obyeknya.

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah ³¹:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi ini cenderung pada hal-hal praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan an apa yang dilarang.

Ditinjauan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 20017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 20017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan peraturan yang menggantikan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas (UPTD) pada dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

Peraturan ini mengatur tentang tugas pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat 2 huruf f yang berbunyi di jelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perparkiran dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan berupa patroli dan melakukan razia-razia dititik-titik terdapat larangan parkir terutama di depan area Sukatramai Trade Centre. Peraturan ini ditetapkan di Pekanbaru Oleh Walikota Pekanbaru Bapak Firdaus pada tanggal 18 Desember 2017 dan diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 18 Desember 2017



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PPENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengawasan terhadap parkir liar di Sukaramai Trade Centre oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis perparkiran pada dinas perhubungan kota pekanbaru. maka disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan perpajakan oleh Dinas Perhubungan terhadap pelaksanaan pengawasan parkir liar belum berjalan optimal sebagaimana pada peraturan walikota nomor 284 tahun 2017 tentang tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis perparkiran pada dinas perhubungan kota pekanbaru pasal 5 ayat 2 huruf f yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perparkiran dilakukan oleh Dinas Perhubungan, dimana masih banyak Juru parkir liar yang tidak patuh terhadap peraturan yang ada. Dan juga sanksi yang dilakukan oleh Dinas perhubungan kurang cukup tegas untuk memberikan efek jera terhadap juru parkir liar dan masyarakat yang membawa kendaraan roda dua dan empat yang memarkirkan kendaraan di tempat sembarangan. Pengelolaan parkir (pengorganisasian dan pergerakan) dengan melakukan penertiban dan pengawasan perparkiran oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran di lokasi parkir masih belum optimal. Dimana, masih ditemukan juru parkir belum menjalankan tugas kewajibannya, seperti adanya juru parkir yang tidak menggunakan kelengkapan parkir dan mengenakan tarif retribusi melebihi ketentuan yang diatur kepada pengguna jasa layanan parkir.

2. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru antara lain, terbatasnya sumber daya yang dimiliki UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, baik secara jumlah personil pengawas maupun sumber daya operasional, seperti mobil, motor dan dana yang dimiliki UPT Perparkiran guna mengelola perparkiran. Selain itu, faktor lainnya adalah perilaku masyarakat/pengguna jasa parkir yang kurang peduli akan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009, Bab XXII mengenai Pengelolaan Perparkiran (Pasal 254) dan peraturan lainnya, seperti besaran tarif parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Lokasi Parkir yang tidak memadai sehingga menyebabkan terjadinya parkir liar, lahan parkir yang kurang serta kesadaran juru parkir liar apabila telah di tertibkan tidak kembali membuat lahan parkir liar yang menyebabkan kemacetan

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka diajukan saran sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki pengawasan parkir liar oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap parkir liar di Sukaramai Trade Center, sebagai berikut:

Pemerintah Kota Pekanbaru dan/atau Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus lebih memperhatikan penambahan sumber daya, baik penambahan personil pengawas maupun sumber daya operasional (mobil patroli dan mengalokasikan dana guna operasional monitoring/ pengecekan terhadap kondisi- kondisi parkir yang ada secara lebih terjadwal. Dan juga Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus lebih menerapkan sanksi dan aturan yang tegas terhadap pelanggar parkir liar, juru parkir liar dan oknum-oknum dari Dinas Perhubungan yang menyalahgunakan aturan, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelanggar tersebut.

Dinas Perhubungan sebaiknya melakukan pembinaan khusus kepada juru parkir sebagai pengelola fasilitas parkir yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Adanya edukasi kepada pengguna jasa parkir, baik langsung maupun berupa himbauan, seperti pemasangan plang, benner di lokasi-lokasi parkir yang potensial atau lokasi strategis mengenai hak dan kewajiban pengguna jasa parkir dalam pengelolaan perparkiran. Dan menetapkan sanksi-sanksi yang tegas terhadap pengguna jasa parkir liar dan juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

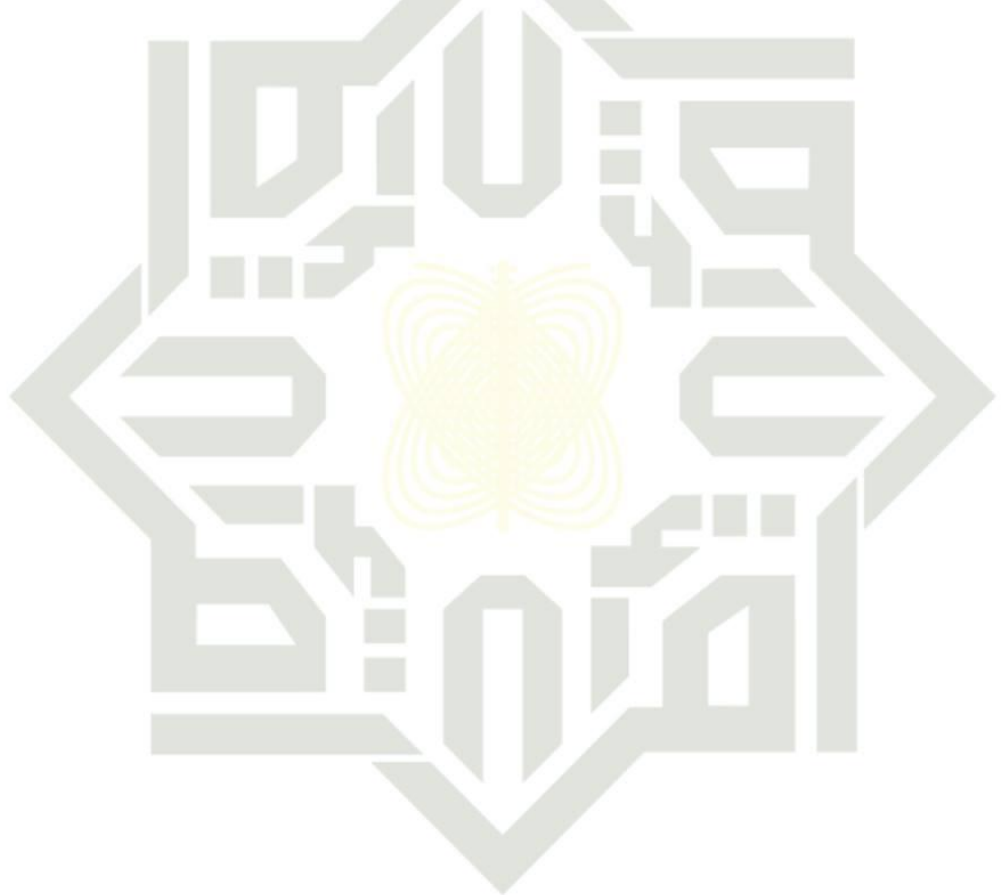
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap juru parkir liar, sanki dapat berupa teguran awal hingga penetapan denda yang dapat menyebabkan efek jera baik bagi pengguna jasa parkir liar maupun terhadap juru parkir liar. Dan percepatan pembangunan lokasi parkir di dalam kawasan Sukaramai Trade Centre agar tidak terjadinya parkir liar yang berada di depan kawasan dari Sukaramai Trade Centre tersebut.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Napitupulu, Paimin, 2012, *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*, Jakarta: P.T Alumni
- Ali Samah dan Peri Pirmansyah, 2015, *Hukum Administrasi Indonesia*, Pekanbaru: STAI H.M lukman Edy Press.
- Indriati s, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Herdiansyah, Haris, 2010, *Metode Kualitatif untu Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika
- M. Hajar, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
- Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Supriatna, Tjahya, 2000, *Ssitem Administrasi Pemerintahan di Daeah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Naang prayudyanto, Muhammad, 2015, *Manejemn Perparkiran di Perkotaan*, Jakarta: GIZ

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Wahyuo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika
- Solman Soeddharyo, 1955, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika
- Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1995, *Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan*.
- Raharjo Adisasmita, 2011, *Manajemen Pemerintah*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Alamin Mufham, 2006, *Manajemen Pengawasan* , Jakarta : Kalam indonesia
- Manullang, 1988, *Dasar-dasara Manajemen*, Medan : Ghalia Indonesia
- Dellyana Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty
- Soekanto Soerjono, 2004, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta : Rajab Grafindo Persada
- Iloa, Abdiana, 2016, *Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta*, Yogyakarta:Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, Vol.4 No.2
- Nadir, Sakinah, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa, menuju pemberdayaan masyarakat desa*, Makasar:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurnal, Vol.1
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata cara kerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

unit pelaksana teknis perparkiran pada dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru

Radinal Munandar Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Wawancara Tanggal 5 Mei 2021

Doni, Juru Parkir Resmi Sukaramai Trade Centre, Wawancara Tanggal 7 Mei 2021.

Fajri, Juru Parkir Liar Sukaramai Trade Centre, Wawancara Tanggal 7 Mei 2021.

[Hhttp://pekanbaru.go.id/sejarah](http://pekanbaru.go.id/sejarah) –peknabru, tanggal 4 maret 2021 pukul 19:00 WIB

<http://dishub.pekanbaru.go.id/>

Dokumentasi *Profil Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru.2010.HI*

Dokumentasi *Profil Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru.2010.H7*

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul *"PENGAWASAN PARKIR LIAR DI SUKARAMAI TRADE CENTRE OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 284 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PESERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANATUGAS PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU"* yang ditulis oleh :

Nama	: MUHAMMAD RIZQI LAZWARDI
NIM	: 11727101093
Program Studi	: Ilmu Hukum
Tela dimunaqasahkan pada :	
Hari / Tanggal	: Kamis, 1 Juli 2021
Waktu	: 08.00 WIB
Tempat	: Daring / Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juli 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag.

Sekretaris
Basir, S.H., M.H.

Penguji I
Musrifah, S.H., M.H.

Penguji II
Ilham Akbar, S.H., M.H.

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Muhammad Rizqi Lazwardi**
 NIM : **11727101093**
 Jurusan : **Ilmu Hukum**
 Judul : **Pengawasan Parkir Liar Di Sukaramai Trade Centre Oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Pembimbing : **Roni Kurniawan, S.H., M.H**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 08 Juli 2021

Pimpinan Redaksi,



M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

Scripta Diindungi Undang-Undang

Scripta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 18 Maret 2021

: Un.04/F.I/PP.00.9/3009/2021

: Bina

: 1 (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD RIZQI LAZWARDI
NIM : 11727101093
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pengawasan Parkir Liar di Sukaramai Trade Center Oleh Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Perpustakaan Pada D

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/39906
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/FPP.009/3009/2021 Tanggal 18 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

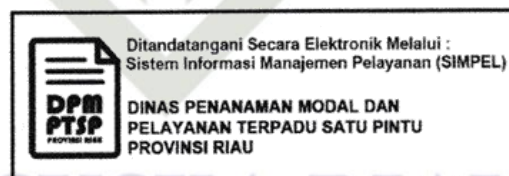
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD RIZQI LAZWADI |
| 2. NIM/ KTP | : | 11727101093 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGAWASAN PARKIR LIAR DI SUKARAMAI TRADE CENTRE OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 284 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PESERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TUGAS PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU&RDQUO; |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Maret 2021



Pembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sukaraja Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya
Gedung B.9, Lt I & II
Kecamatan Tenayan Raya - Kota Pekanbaru



B = Biasa
R = Rahasia
P = Penting

LEMBAR DISPOSISI B R P

Index : Kode 0288	Perihal Rekomendasi A.n. Muhammada Rizqi Lazuardi Tanggal 04 Mar 2021 Asal DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI RIAU	Diterima 04 Mei 2021 Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39906 Tanggal 04 Mei 2021 Disampaikan kepada
DISPOSISI KEPADA →	1. Sekretaris	5. Kasubbag Umum
	2. Kabid Angkutan	6. Kasubbag Keuangan & Program
	3. Kabid MRLL	7. Bendahara
	4. Kabid KTSP	8. Kepala UPTD <i>Indris</i>
INSTRUKSI ↓ INFORMASI →		
Hadir Mewakili Untuk Diproses / Diselesaikan Untuk dimaklumi / Diketahui Siapkan Bahan / Materi Saran Pertimbangan Edarkan / Umumkan		
<div style="text-align: right;"> <i>Amel</i> <i>4/5</i> Kepala, </div>		

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Muhammad Rizqi Lazwardi, lahir di Jakarta pada 6 Januari 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara ini merupakan putra dari pasangan bapak Lazwardi Kasmir,.S.E dan ibu Suhada Syam. Penulis telah menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah dasar di SD Global Andalan Pelalawan (2010), SMP 4 Negeri Pekanbaru (2014) dan SMA Negeri 1 Pekanbaru (2017). Setelah lulus dari bangku aliyah, melalui jalur undangan penulis melanjutkan pendidikannya ke universitas UIN Sultan Syarif

Kasim Riau, pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum dengan konsentrasi yang dipilihnya yakni Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa, dalam rangka mengaplikasikan ilmu/teori yang telah dipelajari selama di bangku kuliah, maka penulis melakukan kegiatan magang di Biro Hukum Kantor Gubernur Provinsi Riau, selama satu setengah bulan. Penulis juga aktif dalam kegiatan Organisasi yakni pernah mengikuti Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum dan juga Aktif dalam Organisasi Basiswa Bank Indonesia yang bernama Genbi dari tahun 2020 hingga 2021

Pada hari Kamis 1 Juli 2021, Alhamdulillah penulis dinyatakan **LULUS** jenjang strata satu dan menggandeng gelar sarjana hukum (S.H.) dengan judul skripsi “Pengawasan Parkir Liar di Sukaramai Trade Centre Oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ”.